



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TABALONG**





BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 5

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025


BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

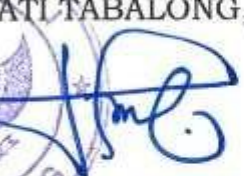
BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
8. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Kerja Dinas Sosial
18. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Kerja Dinas Perhubungan
21. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan
dan Holtikultura
24. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

27. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
30. Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
31. Rencana Kerja Kecamatan Tanta
32. Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
33. Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
34. Rencana Kerja Kecamatan Kelua
35. Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
36. Rencana Kerja Kecamatan Jaro
37. Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
38. Rencana Kerja Kecamatan Haruai
39. Rencana Kerja Kecamatan Upau
40. Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara
41. Rencana Kerja Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim

The official stamp of the Bupati of Tabalong is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a Garuda (mythical bird) in the center. The word "BUPATI" is written in a semi-circle at the top, and "TABALONG" is written in a semi-circle at the bottom. There are two small stars on either side of the central emblem.
BUPATI TABALONG,
A blue ink signature is written over the stamp.
MUHAMMAD NOOR RIFANI

DAFTAR ISI		Halaman
Daftar Isi.....		i
Kata Pengantar.....		ii
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1 Latar Belakang		3
1.2 Landasan Hukum.....		4
1.3 Maksud dan tujuan.....		6
1.4 Sistematika penulisan		7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPERSIP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPERSIP.....		8
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DISPERSIP Tahun Lalu dan Capaian Renstra DISPERSIP		9
2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan DISPERSIP.....		15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISPERSIP		16
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD		26
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....		39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG.....		41
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional		41
3.2 Tujuan dan sasaran Renja DISPERSIP		44
BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		63
BAB V PENUTUP		96

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong tahun 2026 terselesaikan

Renja Akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong tahun 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026, untuk menjalankan Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Ranhir ini memuat tujuan dan sasaran Dispersip Kabupaten Tabalong beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu inikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Ranhir Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026

Kami menyadari bahwa ranhir Renja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Ranhir Renja Dispersip Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat bagi Pembangunan Kabupaten Tabalong.

Tabalong, 14 November 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tabalong,



Hj. NORHAYATI, SE, M.Si

NIP. 19690203 199803 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

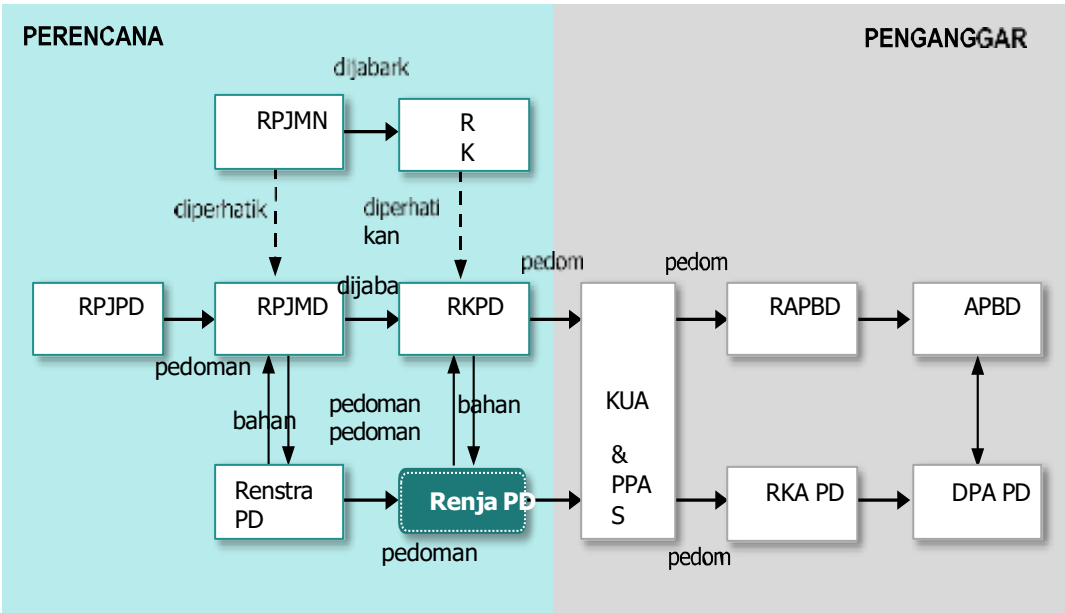
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Dispersip) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 23 Juni 2023, maka dokumen Renja Dispersip Kabupaten Tabalong untuk Tahun 2024 menerapkan dan memutahirkan kodefikasi dan nomenklatur sesuai Keputusan ini. Kodefikasi dan Nomenklatur Program / Kegiatan dan Belanja Daerah dalam Kepmendagri ini merupakan acuan bagi Dispersip dalam melakukan sinkronisasi tatakelola penyelenggaraan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD”.

Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi bahan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyempurnakan Penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2026

Penyusunan Renja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Renja Dispersip dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dispersip, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dispersip, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja

Tahun 2024 yang mulai bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19 pada tahun 2023. Selanjutnya Renja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 459);

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dispersip Kabupaten Tabalong secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dispersip Kabupaten Tabalong tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dispersip Kabupaten Tabalong pada tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dan Renstra Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dispersip Kabupaten Tabalong secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Ranwal Renja Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dispersip Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Renja Dispersip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispersip
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispersip
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dispersip
- 2.4 Riview Terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Dispersip

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dispersip

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dispersip

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISPERSIP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispersip Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispersip

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja Dispersip tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berikutnya (tahun 2026) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, sesuai dengan perubahan perencanaan strategis periode 2025-2026

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja untuk Tahun 2024 ditunjukkan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tabalong

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (RenjaP erangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perang kat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d Tahun Berjala n (2025)	Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)	11=(1 0/4)
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Pengunjung	19,7%	22,20%	19,66%	21,81%	110,94%	20,16%	30,79%	156,61
		Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka	25,0%	0,27	0,25	281	112,40%	0,25	21,00%	84,00
		Persentase Perpustakaan Yang Dibina	40,0%	21,97%	40%	40%	100%	53%	53,00%	132,50
		Persentase Jumlah Pengunjung	19,66%	22,20%	19,66%	21,81%	110,94%	20,16%	30,79%	156,61

2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Anggota Perpustakaan	11,01%	14,47%	11,01%	3,79%	29,25%	11,06%	11,58%	105,18
		Tingkat Kepuasan Masyarakat	86,00%	85%	86%	89,87%	104,50%	87%	88,00%	102,33
		Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka	25,00%	274	0,25	281	112,40%	0,25	0,21	84,00
		Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Dilestarikan	675	6.978	6.75	7.383	109,38%	250	7633	1130,81
			Eks	Eks	Eks	Eks		Eks	Eks	
		Persentase Perpustakaan yang Dibina	40,00%	723%	40%	40%	100%	53%	53%	132,50
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	18	9	18	18	100%	19	19	105,56
			Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pengelolaan Arsip di OPD								
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000	1786	500	1786	357%	1000	1500	150%
			Berkas	Berkas	Berkas	Berkas		Berkas	Berkas	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13	0	15	16	107%	13	13	100%
			Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
		Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	0	0	0	0		0	0	0.00%
			Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000	1000	1000	1000	100%	150	385	257%
			Arsip	Arsip	Arsip	Arsip		Arsip	Arsip	
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit	3	3	3	3	100%	1	1	100%

2.24.02.2.0 3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan	Laporan	
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400	426	400	426	106,5	250	326	130%
			Pengguna	Pengguna	Pengguna	Pengguna		Pengguna	Pengguna	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip									

2.24.03.2.0 1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000	0	0	0	1	1000	0	
			Berkas	Berkas	Berkas	Berkas		Berkas	Berkas	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100	100	100	100	100	100	50	50%
			Arsip	Arsip	Arsip	Arsip		Arsip	Arsip	
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1000	7138	7000	7138	7139	1000	1093	109%
			Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	
	Autentikasi Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan	100	0	0	0	1	100	100	100%

	Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	Arsip	
2.23.01	Kabupaten / KotaProgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.23.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	9	9	6	66,70%	9	5	17%
			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
2.23.01.2.0 2		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	27	54	200%	29	29	71%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	Orang/Bulan	
2.23.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	0	12	0	0'00%	12	10	83%
			Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	
2.23.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket/Dokumen/Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	42	21	42	23	54,76	42	32%	32%
			Paket/Dokumen/Laporan	Paket/Dokumen/Laporan	Paket/Dokumen/Laporan	Paket/Dokumen/Laporan	%	Paket/Dokumen/Laporan		
2.23.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	29	29	29	29	100%	17	40	40%
			Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	
	Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan	24	24	24	12	50%	24	53,40%	53,40%

2.23.01.2.0 8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan		Laporan		
2.23.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	40	39	40	20	65%	24	24	65%
			Unit	Unit	Unit	Unit		Unit	Unit	

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu yang ditunjukkan dalam tabel 2.1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan telah dapat memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dalam Perubahan Renja Dispersip Tahun 2024 dan diperkirakan akan terealisasi sepenuhnya untuk target kinerja pada tahun 2024. Aktivitas-aktivitas kegiatan dilaksanakan dengan lancar untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, dengan demikian target kinerja tetap dapat dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan.

Dari sisi anggaran, realisasi anggaran yang dicapai Dispersip Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 11.749.219.259,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp.12.901380373,- yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024. Dengan demikian persentase realisasi anggaran pada tahun 2024 ini adalah sebesar 99.77%

Evaluasi pelaksanaan Renja Dispersip tahun 2024 dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan IV dengan mengacu pada APBD tahun berjalan, dimana nomenklatur program dan kegiatan telah mengalami penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 27 Desember 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dispersip

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terdiri dari Sekretariat dan tiga bidang, telah menjalankan fungsi meningkatkan kegemaran membaca melalui pembangunan literasi dan meningkatkan pengelolaan, perlindungan, penyelamatan, perijinan dan penggunaan

Fungsi tersebut berjalan lancarnya dengan meningkatnya kunjungan ke perpustakaan serta meningkatkan pengelolaan arsip perangkat daerah

Hal-hal penting yang telah dilaksanakan oleh Dispersip dalam menjalankan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

NO	Indikator (IKU,SPM, IKK)	Angka Nilai Target Standar (IKU, SPM,IKK)	Target Renstra Dispersip				Realisasi Capaian		Realisasi Tahun Berjalan	Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2024	2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Jumlah Pengunjung (Persen)	Persen	15,09	16,26	16,37	16,56	21,9	16,98	30,79	
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)		38.765	42.500	43.000	43.500	56.270	44.381	80.489	
	Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong		256.900	261.400	262.631	262.631	256.900	261.400	261.400	
2	Rasio Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka (Rasio)	Rasio	0,13	0,13	0,15	0,16	0,14	0,15	0,21	
	Jumlah Buku yang dimiliki (Judul)		33.705	33.875	40.403	41.500	36.668	40.443	55.724	
	Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong		256.900	261.400	262.631	262.631	256.900	261.400	261.400	
3	Persentase Perpustakaan Yang Dibina (Persen)	Persen	40,04	52,52	57,85	59,64	40,04	52,52	53	
	Jumlah Perpustakaan yang dibina (Perpustakaan)		199	261	291	300	199	261	326	
	Jumlah Perpustakaan di Kab. Tabalong		497	497	503	503	497	497	497	
4	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)	Persen	35	45	33	33	45	55	33	
	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		14	18	13	13	18	22	13	
	Jumlah Seluruh OPD Kab. Tabalong		40	40	40	40	40	40	40	
5	Jumlah Perlindungan, Penyelamatan Arsip, Autentifikasi Arsip Statis dan Alih Media (Arsip)	Dokumen	275	300	150	150	1385	8314	385	
	Jumlah Arsip Hasil Akuisisi		275	300	150	150	1.385	8314	385	

Nilai AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
------------	-------	----	----	----	----	----	----	----	--

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispersip

Berikut **isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tabalong**, disusun berdasarkan fungsi umum Dispersip serta pola isu yang sering terjadi pada OPD bidang perpustakaan dan kearsipan di daerah:

1. Akses dan Kualitas Layanan Perpustakaan

Isu:

- **Minimnya literasi masyarakat**, terutama di wilayah desa/kelurahan yang jauh dari pusat layanan.
- **Koleksi buku tidak merata** dan banyak koleksi yang sudah tidak relevan.
- **Keterbatasan fasilitas** (ruang baca, komputer, WiFi, gedung) yang mengurangi kenyamanan layanan.
- **Layanan perpustakaan keliling** belum menjangkau seluruh wilayah.

2. Pengembangan Perpustakaan Digital

Isu:

- Sistem perpustakaan digital belum optimal atau belum banyak digunakan.
- Minimnya SDM yang mampu mengelola teknologi informasi perpustakaan.
- Rendahnya literasi digital masyarakat untuk mengakses e-book atau layanan online.

3. Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah

Isu:

- **Manajemen arsip belum standar**, termasuk pelaksanaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) di SKPD.
- **Kurangnya kesadaran OPD** dalam menyerahkan, memelihara, atau menyelamatkan arsip vital dan arsip permanen.
- **Sarana-prasarana penyimpanan arsip** belum ideal (ruang arsip, rak, boks arsip, pengendalian suhu/kelembaban).
- Belum optimalnya **sistem kearsipan elektronik (e-arsip)**.

4. Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa

Isu:

- Banyak perpustakaan sekolah tidak memiliki tenaga pustakawan/tenaga perpustakaan terlatih.

- Perpustakaan desa belum aktif atau koleksinya masih sangat terbatas.
- Kurangnya pembinaan rutin dari Dispersip.

5. Sumber Daya Manusia (SDM)

Isu:

- Keterbatasan jumlah pustakawan dan arsiparis.
- Kompetensi SDM belum merata terutama dalam bidang digitalisasi, katalogisasi, dan manajemen arsip modern.
- Tingkat rotasi pejabat/pegawai mengganggu kesinambungan program.

6. Anggaran dan Prioritas Program

Isu:

- Alokasi dana perpustakaan & kearsipan cenderung kecil dibanding sektor lain.
- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan buku, digitalisasi arsip, dan pembinaan desa/kelurahan.

7. Kolaborasi dan Kemitraan

Isu:

- Kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, CSR perusahaan, dan perguruan tinggi belum maksimal.
- Kurang promosi program atau event literasi.

8. Inovasi Layanan

Isu:

- Masih minim inovasi, seperti pojok baca digital, perpustakaan inklusi, kelas literasi, dan ruang kreatif.
- Pemanfaatan media sosial untuk edukasi literasi belum optimal.

9. Kepatuhan terhadap Regulasi Kearsipan

Isu:

- Belum semua OPD mematuhi standar nasional kearsipan (Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi, penyusunan Kode Klasifikasi Arsip, dll).
- Masih lemahnya pengawasan internal terhadap tata kelola arsip.

10. Peningkatan Budaya Literasi Masyarakat

Isu:

- Minat baca masyarakat masih rendah.
- Kurangnya kampanye masif tentang literasi fungsional (finansial, digital, kesehatan, media).

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Bupati. Perumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong. Dalam menjalankan peran tersebut, akan banyak tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong,

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih :

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 memberi arah yang berfokus bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong. Visi Kabupaten Tabalong sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong. Mempedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah:

Menuju tabalong smart Sejahtera, maju, religius dan terdepan

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong Sejahtera;

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju;

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber dayamasyarakat.

Kabupaten Tabalong Religius;

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, **"TABALONG SMaRT"** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

2. Misi

Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

2.1 **Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.**

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan Masyarakat; dan
- c) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2.2 **Mendorong Kemajuan Daerah.**

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Tabalong yang SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Langkah- langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah;

- a. membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pengembangan industri lokal; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

2.3 Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius;

- a. menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b. memfasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial yang mendukung pengembangan moral dan spiritual masyarakat; dan
- c. mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam kebijakan pembangunan daerah, sehingga setiap program yang dijalankan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

2.4 Menjadi Daerah yang Terdepan.

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan

identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan. Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan;

- a. menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi;
- b. meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional; dan
- c. berkomitmen untuk memberikan pelayanan public yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu : ***“Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif”***.

Melihat visi dan misi dari Bupati dan wakil Bupati terpilih, tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dalam perumusan kebijakan bidang perpustakaan dan kearsipan 2025-2029 diantaranya :

1. **Bidang Perpustakaan**

adalah kurangnya kualitas perpustakaan dan kuantitas sumber daya manusia ,Kurangnya literasi Masyarakat dalam Implementasi informasi kuantitas SDM, Kurangnya kualitas dalam pengelolaan perpustakaan, Kurangnya kualitas perpustakaan dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan, Kurangnya literasi Masyarakat dalam implementasi bahan bacaan / informasi, Kurangnya koleksibahan Pustaka yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan Kurangnya

sarana dan prasarana dalam menunjang layanan Perpustakaan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan dari semua pihak untuk meningkatkan pelayanan di bidang perpustakaan baik bantuan sarana dan prasarana maupun Sumber Daya Manusia yang ada dalam pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Kearsipan

adalah masih rendahnya pengelolaan arsip mengakibatkan pedoman kearsipan masih belum dimanfaatkan dan diberlakukan secara maksimal

Tabel. 2.2 Penyusunan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan minat baca	Masih Rendahnya Minat dan Kegemaran membaca dalam Membangun Literasi Masyarakat		Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya minat baca dan Akses Bahan bacaan yang Berkualitas	Rendahnya Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Daerah	Masih Rendahnya Literasi Masyarakat Dalam Mendukung Kualitas Sumber Daya Manusia
Layanan Kearsipan OPD	Masih Rendahnya Tata Kelola Kearsipan yang Baik		Rendahnya Tata Kelola Kearsipan dalam Pemerintahan	Rendahnya Budaya Tertib Arsip	Rendahnya Kesadaran Tata Kelola Kearsipan di Daerah	Masih Rendahnya Kesadaran terhadap Tata Kelola Kearsipan yang Baik pada Pemerintah

						Daerah dalam Mewujudkan Budaya Tertib Arsip
--	--	--	--	--	--	---

Dari permasalahan di atas akhirnya bisa disimpulkan isu-isu strategis yang harus di diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi
2. Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tabalong

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KET
Meningkatnya penerapan inovasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Literasi masyarakat	Meningkatnya Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	Meningkatnya Tata Kelola Arip	Meningkatnya Tata Kelola Arip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	

2.4 Review Terhadap APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Bab I ayat 1 disebutkan bahwa Anggaran Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada APBD terdapat 4 program dan 14 kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Program dan kegiatan dimaksud tergambar dalam Tabel 2.4 di bawah ini

Tabel 2.4

Reviu terhadap Renja Tahun 2025 Dispersip Kabupaten Tabalong

No.	RANCANGAN AWAL RPKD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 7.353.531.533,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispersip Kab. Tabalong			Rp8.268.337.278,0		Rp 914.805.745,00
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 104.252.227,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp109.201.262,0		Rp 4.949.035,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 13.979.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp13.979.000,0		Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.000.000,0		Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.500.000,0		Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.250.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.250.000,00		Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	Rp 1.750.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp1.750.000,0		Rp -

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Rp 8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	Rp8.000.000,00		Rp -
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	Rp 68.773.227,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	2 Laporan	Rp73.722.262,00		Rp 4.949.035,00
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	Rp 4.500.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	Rp4.500.000,00		Rp -
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	Rp 3.500.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	Rp3.500.000,00		Rp -
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 4.993.094.140,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp5.001.094.140,00		Rp 8.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Rp 4.943.344.140,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	Rp4.943.344.140,00		Rp -
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	Rp1.000.000,00		Rp -
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp 750.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Rp750.000,00		Rp -

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	Rp 27.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp35.000.000,00	Kurangnya Dana untuk Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2	Rp 8.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp 20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Rp20.000.000,00		Rp -
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18 Dokumen	Rp 1.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18 Dokumen	Rp1.000.000,00		Rp -
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 64.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp64.469.147,00		-Rp 30.853,00
	Pendataan dan Pengolahan Kepegawaian	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Rp 2.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Rp1.984.465,00		-Rp 15.535,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp 2.500.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Rp2.484.682,00		-Rp 15.318,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Dispersip Kab.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	12 Orang	Rp 60.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Dispersip Kab.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	12 Orang	Rp60.000.000,00		Rp -
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersip Kab.			Rp 603.590.166,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dispersip Kab.			Rp786.090.839,00		Rp 182.500.673,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 9.714.301,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp9.709.749,00		-Rp 4.552,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 90.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp89.998.770,00		-Rp 1.230,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 12.380.548,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp12.380.548,00		Rp -
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 20.184.317,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp20.178.772,00		-Rp 5.545,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 5.964.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp8.184.000,00		Rp 2.220.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	Rp 465.347.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	Rp645.639.000,00		Rp 180.292.000,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 135.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp706.785.325,00		Rp 571.785.325,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Rp 90.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	Rp658.134.381,00	Karena Peralatan untuk Pelaksanaan Tugas di Kantor Sudah Lama dan Memerlukan Peralatan Baru	Rp 568.134.381,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 45.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp48.650.944,00		Rp 3.650.944,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 955.745.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp955.744.000,00		-Rp 1.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 108.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp108.600.000,00		Rp -
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 847.145.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp847.144.000,00		-Rp 1.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 497.350.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dispersip Kab. Tabalong			Rp644.952.565,00		Rp 147.602.565,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Rp 314.510.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Rp312.110.000,00		-Rp 2.400.000,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Rp 32.900.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Rp32.842.565,00		-Rp 57.435,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 149.940.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp300.000.000,00	Karena Belum Pernah Dilakukan Pemeliharaan Gedung UPT. Layananan di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Kelua, Haruai, dan Muara Uya	Rp 150.060.000,00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dispersip Kab.			Rp 1.903.594.065,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dispersip Kab.			Rp2.513.846.965,00	Tersedianya Dana tersebut Dapat Memenuhi Kebutuhan	Rp933.734.702,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab.			Rp 1.286.594.065,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat	Dispersip Kab.			Rp1.599.729.186,00		Rp 313.135.131,00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen	4 Layanan	Rp 155.000.000,00	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis	4 Layanan	Rp154.999.990,00		Rp -
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang	30 Perpustakaan	Rp 70.000.000,00	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan	20 Perpustakaan	Rp80.072.665,00	Melaksanakan Amanat Undang-Undang Perpustakaan bahwa Akreditasi Perpustakaan Merupakan Salah Satu	Rp 10.072.665,00
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat	Dispersip Kab.	Jumlah Perpustakaan	5 Perpustakaan	Rp 2.000.000,00	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat	Dispersip Kab.	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina	5 Perpustakaan	Rp17.000.061,00	Memperluas/Menambah Pembinaan Kelembagaan	Rp 15.000.061,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp 100.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp145.002.950,00	1. Dari 596 Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Tabalong, baru 110 Pengelola Perpustakaan atau Pustakawan yang Telah Dibekali Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Perpustakaan, sehingga Perlu Dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pustakawan atau Pengelola Perpustakaan. 2. Peningkatan SDM -BIMTEK Pustakawan	Rp 45.002.950,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota	5 Layanan	Rp 286.836.526,00	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	Rp386.836.416,00	1. Pengembangan Wahana Tampilan dan Pelaksanaan Kegiatan Ajang Event Minggu Ceria 2. Workshop Teknik Skimming dan Speed Reading	Rp 99.999.890,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman	1750 Eksemplar	Rp 617.757.539,00	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1930 Eksemplar	Rp757.757.274,00	1. Cetak Buku Kumpulan Puisi dan Fiksi 2. Titik Baca	Rp 139.999.735,00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	3 Dokumen	Rp 55.000.000,00	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp58.059.830,00	Mendukung Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik pada Diskominfo dan BPS Kabupaten Tabalong melalui Laporan Data dan Informasi Perkembangan Perpustakaan	Rp 3.059.830,00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah	Dispersip Kab. Tabalong				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp914.117.779,00		Rp 1.091.274.923,00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	4 Lokus	Rp 45.000.000,00	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus	Rp90.001.555,00	Meningkatnya Jumlah Permintaan dari Instansi Pendidikan (Sekolah) untuk Dilakukan Sosialisasi sehingga Perlu Menambah Jumlah Volume Kegiatan	Rp 45.001.555,00
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	Rp 107.000.000,00	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4 Perpustakaan	Rp156.999.732,00	Penambahan Sarana Ape Out Door dan In Door sebagai Wahana Lingkungan Ramah Anak	Rp 49.999.732,00
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	Rp 150.000.000,00	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	Rp235.000.508,00	Apresiasi kepada Masyarakat, Pengelola Perpustakaan dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Peran Perpustakaan dan Minat Baca Masyarakat untuk Diikutkan ke Jenjang Provinsi dan Nasional	Rp 85.000.508,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	35 Perpustakaan	Rp 300.000.000,00	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	35 Perpustakaan	Rp410.090.590,0	Melaksanakan Program Proiritas Perpustakaan Nasional dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Rp 110.090.590,00
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	Rp 15.000.000,00	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	Rp22.025.394,0	Melaksanakan Program Perpustakaan Nasional dalam Memilih Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Rp 7.025.394,00
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 880.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dispersip Kab. Tabalong			Rp1.727.439.820,0		Rp 851.182.270,00
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 205.000.000,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp825.602.617,0		Rp 620.602.617,00
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	Rp 55.000.000,00	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	Rp 445.857.622,00	1. Berdasarkan Edaran dari Kementerian tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk dapat meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Pada Perangkat /Dinas Arsip dengan Dana APBD 2. Berdasarkan Nilai Indeks PAN RB terkait Kelembagaan Kearsipan 3. Dalam Sub Kegiatan RENJA awal, kegiatan belum terakomodir : - Bimtek/Sosialisasi Kearsipan - Merayakan Hari Jadi Kearsipan - Jasa Penataan Arsip - Perjalanan Dinas Narasumber dari ANRI ke Tabalong	Rp 390.857.622,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	Rp 150.000.000,00	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	Rp 379.744.995,00	1. Berdasarkan Edaran dari Kementerian tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk dapat meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Pada Perangkat /Dinas Arsip denga Dana APBD 2. Berdasarkan Nilai Indeks PAN RB terkait Kelembagaan Kearsipan 3. Dalam Sub Kegiatan RENJA awal, kegiatan belum terakomodir: - Belanja Makan Minum Bimtek Srikandi Wilayah Utara, Tengah, Selatan - Belanja Makan Minum Bimtek Srikandi untuk Lembaga Pendidikan (SD dan SMP) - Belanja Honor Narasumber Bimtek Srikandi - Belanja Honor Narasumber Bimtek Pengawasan - Uang Transport Lokal Untuk Kegiatan Bimtek di 12 Kecamatan - Perjalanan Dinas ke Jakarta dalam Rangka Koordinasi Pengawasan - Belanja Souvenir untuk Tamu	Rp 229.744.995,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Pengelola a n Arsip Statis Daera h Kabupaten/Kota		Rp 120.000.000,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Pengelola a n Arsip Statis Daera h Kabupaten/Kota		Rp 350.582.699,00		Rp 230.582.699,00
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	Rp 120.000.000,00	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 Arsip	Rp 350.582.699,00	1. Berdasarkan Edaran dari Kementerian tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk dapat meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Pada Perangkat /Dinas Arsip denga Dana APBD 2. Berdasarkan Nilai Indeks PAN RB terkait Kelembagaan Kearsipan 3. Dalam Sub Kegiatan RENJA awal, kegiatan belum terakomodir : - Jasa Penataan Arsip - Belanja Modal Printer untuk Cetak Arsip Foto	Rp 230.582.699,00
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Rp 555.000.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Rp551.254.504,00		-Rp 3.046,00
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	Rp 325.000.000,00	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	Rp 324.996.954,00		-Rp 3.046,00
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit	3 Laporan	Rp 230.000.000,00	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan	3 Laporan	Rp226.257.550,00		Rp -

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 788.000.000,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dispersip Kab. Tabalong			Rp936.792.132,00		Rp 148.800.607,00
	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 218.000.000,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dispersip Kab. Tabalong			Rp217.998.722,00		Rp -
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	Rp 218.000.000,00	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip	Rp217.998.722,00		Rp -
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 170.000.000,00	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp318.800.607,00		Rp 148.800.607,00
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Rp 170.000.000,00	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	Rp318.800.607,00	1. Berdasarkan Edaran dari Kementerian tentang Penyelenggaraan Kearsipan untuk dapat meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Pada Perangkat /Dinas Arsip denga Dana APBD 2. Berdasarkan Nilai Indeks PAN RB terkait Kelembagaan Kearsipan 3. Dalam Sub Kegiatan RENJA awal, kegiatan belum terakomodir : - Belanja Modal Pembangunan Gedung Sederhana (Ruang Restorasi) - Belanja Peralatan dan Kelengkapan Ruang Restorasi	Rp 148.800.607,00

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	Selisih Dana
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NON URUSAN					NON URUSAN						
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 265.000.000,00	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dispersip Kab. Tabalong			Rp264.996.535,00		Rp -
	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah	350 Arsip	Rp 265.000.000,00	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	350 Arsip	Rp264.996.535,00		Rp -
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp 135.000.000,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dispersip Kab. Tabalong			Rp134.996.268,00		Rp -
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	100 Arsip	Rp 135.000.000,00	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Dispersip Kab. Tabalong	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	Rp134.996.268,00		Rp -
	TOTAL				Rp 10.925.125.598,00	TOTAL				Rp13.446.416.195,00		Rp 2.848.523.324,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun program/kegiatan, juga harus diperhatikan usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Pemerintah Kabupaten Tabalong yang langsung ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Dalam hal usulan para pemangku kepentingan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong menerima usulan dari Anggota DPRD Kabupaten Tabalong, biasanya usulan tersebut disampaikan langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, juga melalui Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) serta melalui rapat Kerja Komisi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Namun dalam penganggaran tetap disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, untuk tahun 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak ada menerima usulan dari Para Pemangku Kepentingan seperti pada tabel terlampir. Adapun program kegiatan dimaksud ditunjukkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat/Perangkat Daerah terkait program/kegiatan Dispersip untuk Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispersip			
a	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dispersip	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dok	
b	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dispersip	Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dok	
c	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dispersip	Jumlah Dok Pendataan dan Pengolahan Administrasi	29 Dok	
d	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dispersip	Jumlah Dok Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	29 Dok	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dispersip			
a	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Dispersip	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	20 Data	
b	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dispersip	Jumlah tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Berikut ini adalah tabel telaahan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia :

Tabel 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Renstra
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

No.	Isu Strategis Perpustakaan Nasional	Program Prioritas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
1	Rendahnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2	Pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota;	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3	Pengembangan Perpustakaan Desa/ Kelurahan.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Adapun tabel telaahan terhadap Renstra Kearsipan Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Telaahan Terhadap Renstra Kearsipan
Nasional Republik Indonesia

No	Isu Strategis	Program Prioritas	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja
1.	Penerapan Open Government, Melalui strategi Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi KeKearsipan Nasional	Sistem dan Jaringan Informasi KeKearsipan anan Nasional (JIKN)	Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi KeKearsipan Nasional (JIKN) pada instansi pusat dan Pem. Prov/Kab/Kota	Jumlah instansipusat dan Pem. Prov/Kab/Kota sebagaisimpul dan anggota Jaringan Informasi KeKearsipan Nasional (JIKN)
2.	Tertib pengelolaan Kearsipan aset, melalui penguatan manajemen Kearsipan	Pengelola an Kearsipan Aset Nasional	Meningkatnya efektivitas pengelolaan Kearsipan aset nasional Jumlah instansi pusat	Jumlah instansipusat dan Pem. Prov/Kab/Kota Yang mendapatkan kemampuan teknis Pengelolaan Kearsipan Aset sesuai dengan peraturan perundangan.

3.	Penerapan e-government untuk mendukung Proses pemerintahan dan pembangunan, Melalui strategi Penguatan Sistem keKearsipann berbasis TIK	Penerapan e-Kearsipan dengan Sistem Informasi KeKearsip anan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi KeKearsip anan Statis (SIKS), sasaran capaian 50% tahun 2019	Meningkatnya penerapan e-Kearsipan dengan Sistem Informasi KeKearsipanan	persentase instansi pusat dan pemerintah prov/kab/kota yang menerapkan e-Kearsipan
----	---	---	--	--

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dispersip

Tujuan dan sasaran Renja sebagaimana tercantum dalam Renstra Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026

3.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi
2. Meningkatkan pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip
3. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

3.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi
2. Meningkatnya pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip
3. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Prioritas dan sasaran Dispersip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran Dispersip Kabupaten Tabalong

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJATUJUAN/ SASARAN PADATAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	Meningkatnya Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun					
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan					
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk					
			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun					

			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan					
			Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat					

2	Meningkatkan Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku					
			Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan					
3.	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP					

Hubungan antara tujuan Dispersip dengan sasaran Dispersip dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Tujuan Dispersip Tabalong

No	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan SKPD	Target Kinerja SKPD Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	100%
		Kolekasi buku yang tersedia di perpustakaan	100%
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	100%
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	100%
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	100%
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	100%
2	Meningkatkan pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100 %
		Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	100%
3	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	BB

Tabel 3.1.2

Sasaran Dispersip Kabupaten Tabalong

No	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Sasaran SKPD Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	100%
		Kolekasi buku yang tersedia di perpustakaan	100%
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	100%

		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	100%
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	100%
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	100%
2	Meningkatkan pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100 %
		Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	100%
3	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	BB

Demikian juga menyangkut Indikator Kinerja Utama Dispersip tergambar dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Dispersip Kabupaten Tabalong

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja SKPD Tahun 2026
1	2	3	4
1	Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	100%
		Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun (Orang)	100%
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat (Orang)	100%
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun (Orang)	100%
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (Eksemplar)	100%
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk (Rasio)	100%
2	Meningkatkan pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan (Kegiatan)	100%
		Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan (Orang)	100%
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%
3	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	BB

Tabel 3.3

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PADA DISPERSIP KABUPATEN TABALONG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				13.572.126.019,00		14.685.718.900,00		15.890.682.100,00		17.194.512.500,00		18.605.322.200,00		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.213.986.705,00		11.052.044.300,00		11.958.864.500,00		12.940.089.300,00		14.001.823.600,00		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	10.213.986.705,00	100	11.052.044.300,00	100	11.958.864.500,00	100	12.940.089.300,00	100	14.001.823.600,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				116.995.062,00		116.995.062,00		116.995.062,00		116.995.062,00		116.995.062,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	116.995.062,00	1	116.995.062,00	1	116.995.062,00	1	116.995.062,00	1	116.995.062,00		
	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.23.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				911.000,00		911.000,00		911.000,00		911.000,00		911.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	911.000,00	2	911.000,00	2	911.000,00	2	911.000,00	2	911.000,00		
2.23.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				846.000,00		846.000,00		846.000,00		846.000,00		846.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	846.000,00	1	846.000,00	1	846.000,00	1	846.000,00	1	846.000,00		
2.23.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.23.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00	1	1.100.000,00		
2.23.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		8.800.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9	9	8.800.000,00	9	8.800.000,00	9	8.800.000,00	9	8.800.000,00	9	8.800.000,00		
2.23.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				99.838.062,00		99.838.062,00		99.838.062,00		99.838.062,00		99.838.062,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	99.838.062,00	2	99.838.062,00	2	99.838.062,00	2	99.838.062,00	2	99.838.062,00		
2.23.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	4	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.032.544.000,00		7.870.601.595,00		8.370.601.595,00		9.070.601.595,00		9.970.601.595,00		
Jumlah Dokumen Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	7.032.544.000,00	2	7.870.601.595,00	2	8.370.601.595,00	2	9.070.601.595,00	2	9.970.601.595,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		18		18		18		18		18		18	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	29		29		29		29		29			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.989.794.000,00		7.827.851.595,00		8.327.851.595,00		9.027.851.595,00		9.927.851.595,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	29	29	6.989.794.000,00	29	7.827.851.595,00	29	8.327.851.595,00	29	9.027.851.595,00	29	9.927.851.595,00		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
2.23.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	750.000,00	12	750.000,00	12	750.000,00	12	750.000,00	12	750.000,00		
2.23.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.23.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.23.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)		18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00		
2.23.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.23.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		
Jumlah Data Kepegawaian	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		88.065.986,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12		12		12							
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12							
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	12	12	12	12	12	12	12					
2.23.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.595.620,00		1.595.620,00		1.595.620,00		1.595.620,00		1.595.620,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	1.595.620,00	12	1.595.620,00	12	1.595.620,00	12	1.595.620,00	12	1.595.620,00		
2.23.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.470.366,00		2.470.366,00		2.470.366,00		2.470.366,00		2.470.366,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	2.470.366,00	12	2.470.366,00	12	2.470.366,00	12	2.470.366,00	12	2.470.366,00		
2.23.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				84.000.000,00		84.000.000,00		84.000.000,00		84.000.000,00		84.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	12	84.000.000,00	12	84.000.000,00	12	84.000.000,00	12	84.000.000,00	12	84.000.000,00		
2.23.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.023.002.417,00		1.023.002.417,00		1.429.822.617,00		1.711.047.417,00		1.157.072.417,00		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0		0		0		0		0		
Jumlah Administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1.023.002.417,00	1	1.023.002.417,00	1	1.429.822.617,00	1	1.711.047.417,00	1	1.157.072.417,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3		3		3		3				
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.996.799,00		9.996.799,00		9.996.799,00		9.996.799,00		9.996.799,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	9.996.799,00	10	9.996.799,00	10	9.996.799,00	10	9.996.799,00	10	9.996.799,00		
2.23.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				110.751.618,00		110.751.618,00		110.751.618,00		110.751.618,00		110.751.618,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	110.751.618,00	3	110.751.618,00	3	110.751.618,00	3	110.751.618,00	3	110.751.618,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
2.23.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				6.324.000,00		6.324.000,00		6.324.000,00		6.324.000,00		6.324.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	6.324.000,00	3	6.324.000,00	3	6.324.000,00	3	6.324.000,00	3	6.324.000,00		
2.23.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				865.930.000,00		865.930.000,00		1.272.750.200,00		1.553.975.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	30	865.930.000,00	30	865.930.000,00	30	1.272.750.200,00	30	1.553.975.000,00	30	1.000.000.000,00		
2.23.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				490.786.040,00		490.786.040,00		490.786.040,00		490.786.040,00		1.206.495.340,00		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			490.786.040,00		490.786.040,00		490.786.040,00		490.786.040,00		1.206.495.340,00		
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)													
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		10			
2.23.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				396.584.150,00		396.584.150,00		396.584.150,00		396.584.150,00		1.056.495.340,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	12	396.584.150,00	12	396.584.150,00	12	396.584.150,00	12	396.584.150,00	12	1.056.495.340,00		
2.23.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.23.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				94.201.890,00		94.201.890,00		94.201.890,00		94.201.890,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	94.201.890,00	5	94.201.890,00	5	94.201.890,00	5	94.201.890,00	10	150.000.000,00		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		843.553.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	13		13		13		13				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12				
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				108.600.000,00		108.600.000,00		108.600.000,00		108.600.000,00		108.600.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	108.600.000,00	12	108.600.000,00	12	108.600.000,00	12	108.600.000,00	12	108.600.000,00		
2.23.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				734.953.000,00		734.953.000,00		734.953.000,00		734.953.000,00		734.953.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13	13	734.953.000,00	13	734.953.000,00	13	734.953.000,00	13	734.953.000,00	13	734.953.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		619.040.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN						
			2026		2027		2028		2029		2030									
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU								
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				12		12		12		12									
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12																	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)																			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)																			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)																			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)																			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)																			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3												3	3	3	3	3	3
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		47												47	47	47	47	47	47
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)																				
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			0		0		0		0		0								
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				418.440.000,00		418.440.000,00		418.440.000,00		418.440.000,00		418.440.000,00								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	418.440.000,00	12	418.440.000,00	12	418.440.000,00	12	418.440.000,00	12	418.440.000,00								
2.23.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0		0		0		0		0								
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0								
2.23.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0		0		0		0		0								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				35.666.200,00		35.666.200,00		35.666.200,00		35.666.200,00		35.666.200,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		47	35.666.200,00	47	35.666.200,00	47	35.666.200,00	47	35.666.200,00	47	35.666.200,00		
2.23.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				164.934.000,00		164.934.000,00		164.934.000,00		164.934.000,00		164.934.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	164.934.000,00	3	164.934.000,00	3	164.934.000,00	3	164.934.000,00	3	164.934.000,00		
2.23.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.23.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)			0		0		0		0		0		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				3.358.139.314,00		3.633.674.600,00		3.931.817.600,00		4.254.423.200,00		4.603.498.600,00		
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan (%)	20	25	3.358.139.314,00	30	3.633.674.600,00	35	3.931.817.600,00	40	4.254.423.200,00	45	4.603.498.600,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik (%)	20	25		30		35		40		45			
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.767.646.155,00		3.016.181.441,00		3.222.739.441,00		3.450.559.441,00		3.710.659.441,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Perpustakaan dalam mengelola perpustakaan	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0	5	165.402.699,00	5	185.832.760,00	5	195.935.760,00	5	216.335.760,00	5	231.335.760,00		
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	20		20		20		20		20			
2.23.02.2.01.0015 - Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi				113.688.339,00		130.118.400,00		135.220.400,00		150.520.400,00		160.520.400,00		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	0	5	113.688.339,00	5	130.118.400,00	5	135.220.400,00	5	150.520.400,00	5	160.520.400,00		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				51.714.360,00		55.714.360,00		60.715.360,00		65.815.360,00		70.815.360,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	20	20	51.714.360,00	20	55.714.360,00	20	60.715.360,00	20	65.815.360,00	20	70.815.360,00		
Meningkatnya Kelembagaan Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	62	35	46.011.556,00	35	50.011.556,00	40	60.452.556,00	45	81.952.556,00	50	107.052.556,00		
	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	25	30		35		40		45		50			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				27.551.665,00		28.551.665,00		35.651.665,00		45.851.665,00		50.951.665,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	25	30	27.551.665,00	35	28.551.665,00	40	35.651.665,00	45	45.851.665,00	50	50.951.665,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				8.430.061,00		8.430.061,00		9.550.061,00		15.550.061,00		25.550.061,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	62	35	8.430.061,00	35	8.430.061,00	40	9.550.061,00	45	15.550.061,00	50	25.550.061,00		
2.23.02.2.01.0017 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan				10.029.830,00		13.029.830,00		15.250.830,00		20.550.830,00		30.550.830,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan (Dokumen)	2	3	10.029.830,00	3	13.029.830,00	3	15.250.830,00	3	20.550.830,00	3	30.550.830,00		
Meningkatnya Ketersediaan Koleksi bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.300	1.750	600.728.000,00	1.800	800.728.000,00	1.850	865.730.000,00	1.900	945.750.000,00	2.000	1.040.750.000,00		
	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	0	0		450		550		650		750			
	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	0	0		400		500		750		1.000			
2.23.02.2.01.0014 - Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat				0,00		150.000.000,00		210.000.000,00		275.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	0	0	0,00	450	150.000.000,00	550	210.000.000,00	650	275.000.000,00	750	350.000.000,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				600.728.000,00		490.228.000,00		493.380.000,00		500.320.000,00		505.250.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	1.300	1.750	600.728.000,00	1.800	490.228.000,00	1.850	493.380.000,00	1.900	500.320.000,00	2.000	505.250.000,00		
2.23.02.2.01.0019 - Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				0,00		160.500.000,00		162.350.000,00		170.430.000,00		185.500.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	0	0	0,00	400	160.500.000,00	500	162.350.000,00	750	170.430.000,00	1.000	185.500.000,00		
Meningkatnya Pemerataan Layanan Perpustakaan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	5	6	1.955.503.900,00	6	1.970.503.900,00	6	2.090.510.900,00	6	2.191.010.900,00	6	2.311.010.900,00		
	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	31		29		28		27		25			
2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota				297.372.900,00		300.372.900,00		310.375.900,00		340.875.900,00		360.875.900,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	5	6	297.372.900,00	6	300.372.900,00	6	310.375.900,00	6	340.875.900,00	6	360.875.900,00		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				1.658.131.000,00		1.670.131.000,00		1.780.135.000,00		1.850.135.000,00		1.950.135.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	3	31	1.658.131.000,00	29	1.670.131.000,00	28	1.780.135.000,00	27	1.850.135.000,00	25	1.950.135.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningktanya Sarana Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0	0	0,00	10	9.105.225,00	10	10.110.225,00	10	15.510.225,00	10	20.510.225,00		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0,00		9.105.225,00		10.110.225,00		15.510.225,00		20.510.225,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	0	0	0,00	10	9.105.225,00	10	10.110.225,00	10	15.510.225,00	10	20.510.225,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				590.493.159,00		617.493.159,00		709.078.159,00		803.863.759,00		892.839.159,00		
Meningkatnya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	290.107.814,00	15	302.107.814,00	15	346.796.814,00	15	401.482.414,00	14	451.482.414,00		
	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	3	3		3		3		3		3			
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				225.021.903,00		235.021.903,00		276.210.903,00		305.596.503,00		345.596.503,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	15	10	225.021.903,00	15	235.021.903,00	15	276.210.903,00	15	305.596.503,00	14	345.596.503,00		
2.23.02.2.02.0008 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				65.085.911,00		67.085.911,00		70.585.911,00		95.885.911,00		105.885.911,00		
Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	3	3	65.085.911,00	3	67.085.911,00	3	70.585.911,00	3	95.885.911,00	3	105.885.911,00		
Meningkatnya Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1	2	300.385.345,00	2	315.385.345,00	2	362.281.345,00	2	402.381.345,00	2	441.356.745,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	11	55		55		55		55		55			
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	12	12		12		12		12		12			
2.23.02.2.02.0006 - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				21.910.320,00		23.910.320,00		25.910.320,00		30.910.320,00		35.910.320,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	1	2	21.910.320,00	2	23.910.320,00	2	25.910.320,00	2	30.910.320,00	2	35.910.320,00		
2.23.02.2.02.0009 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				190.563.508,00		200.563.508,00		220.850.508,00		235.950.508,00		250.950.508,00		
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	11	55	190.563.508,00	55	200.563.508,00	55	220.850.508,00	55	235.950.508,00	55	250.950.508,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				87.911.517,00		90.911.517,00		115.520.517,00		135.520.517,00		154.495.917,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	12	12	87.911.517,00	12	90.911.517,00	12	115.520.517,00	12	135.520.517,00	12	154.495.917,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				1.453.509.608,00		1.572.770.000,00		1.701.815.700,00		1.841.449.600,00		1.992.540.400,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				895.042.808,00		967.637.400,00		1.047.311.500,00		1.133.563.900,00		1.226.934.300,00		
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	20	40	895.042.808,00	45	967.637.400,00	50	1.047.311.500,00	55	1.133.563.900,00	60	1.226.934.300,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				413.063.910,00		472.660.400,00		505.919.280,00		548.599.941,00		600.338.250,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)		5	413.063.910,00	6	472.660.400,00	7	505.919.280,00	8	548.599.941,00	9	600.338.250,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	15	16		17		18		20		21			
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	500	1.000		1.050		1.100		1.150		1.200			
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				60.484.638,00		115.865.710,00		124.401.468,00		144.905.179,00		166.088.170,00		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	500	1.000	60.484.638,00	1.050	115.865.710,00	1.100	124.401.468,00	1.150	144.905.179,00	1.200	166.088.170,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				149.981.264,00		155.594.690,00		168.913.906,00		180.967.110,00		192.717.398,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	15	16	149.981.264,00	17	155.594.690,00	18	168.913.906,00	20	180.967.110,00	21	192.717.398,00		
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				202.598.008,00		201.200.000,00		212.603.906,00		222.727.652,00		241.532.682,00		
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)		5	202.598.008,00	6	201.200.000,00	7	212.603.906,00	8	222.727.652,00	9	241.532.682,00		
2.24.02.2.02 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				131.983.535,00		141.983.000,00		163.786.906,00		184.310.652,00		203.532.682,00		
Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	1.000	200	131.983.535,00	250	141.983.000,00	300	163.786.906,00	350	184.310.652,00	400	203.532.682,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				131.983.535,00		141.983.000,00		163.786.906,00		184.310.652,00		203.532.682,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dispersip Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 DISPERSIP Kabupaten Tabalong

Tema Pembangunan 2026	:	Penguatan Daya Saing Daerah menuju Tabalong yang Sejahtera, Dinamis, Maju Dan Berkelanjutan.
Isu-Isu Strategis Kabupaten Tabalong	:	1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. 2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing 3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur 4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi pada Pelayanan Publik 5. Pembangunan yang berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Bencana
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2026	:	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia 2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik 3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN

		4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal 5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026	:	1. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing 3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN 4. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal, dan 5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
PROGRAM PRIORITAS DAERAH 2024		PROGRAM DISPERSIP TAHUN 2026
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal	:	1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal	:	1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 diawali dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Adapun prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang berfokus pada pelayanan publik
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Adapun program Dispersip pada tahun 2026 terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan yang masuk dalam prioritas daerah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran, Program dan Subkegiatan Dispersip Kabupaten
Tabalong

No	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatkan Minat dan Kegemaran Membaca Melalui Pembangunan Literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Konsultasi Publik 2. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 3. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 4. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 5. Pengembangan Bahan Pustaka 6. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/KotaDaerah dengan sub kegiatan : 1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.	Meningkatkan pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan, Perizinan dan Penggunaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan : 1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 2. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
		Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dan Sub Kegiatan : 1. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan: 1. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
3.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan Sub Kegiatan : 1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah 9. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan sub kegiatan : 1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.3

Keselarasan Program Dispersip dan Prioritas Daerah Tahun 2026

No.	Program Dispersip	Prioritas Daerah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
2	Program Pembinaan Perpustakaan	
3	Program Pengelolaan Arsip	
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

Adapun rencana program dan kegiatan Dispersip Kabupaten Tabalong secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dispersip Kabupaten tabalong tahun 2026 dan Prakiraan maju tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIANKINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
											NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						15.025.635.627,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.772.415.109,00				
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						12.318.905.501,00				
1,	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	8.960.766.187,00				
		[Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah]	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan	100	-	100	100	8.960.766.187,00	-	-	-	-
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.012.544.000,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										

			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				29 Orang/bulan	6.989.794.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.

	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.	-
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	-	-			-	1.595.620,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.	-
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegaw aian											
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	1.595.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.	-
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.023.002.417,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.	-
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	9.996.799,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	110.751.618,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				3 Dokumen	6.324.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	865.930.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan sumber daya manusia yang religius, berkualitas, dan berkarakter.
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	396.584.150,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	396.584.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.

	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	108.600.000,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	108.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	418.440.000,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	418.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
2,	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-			-	3.358.139.314,00				

		[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	45	20	20	25	3.358.139.314,00	-	-	-	-
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.767.646.155,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	27.551.665,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota										
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				5 Layanan	297.372.900,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi										

			<i>Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi</i>				1000 Dokumen	122.118.400,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	51.714.360,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan										
			<i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>				3 Dokumen	10.029.830,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan										
			<i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i>				400 Eksemplar	600.728.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik										

			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				4 Perpustakaan	1.658.131.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	590.493.159,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya</i>				1 Orang	21.910.320,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial										
			<i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>				35 Perpustakaan	225.021.903,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										

			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4 Perpustakaan	65.085.911,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca										
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				20 Orang	190.563.508,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat										
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	87.911.517,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						1.453.509.608,00				
1,	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-			-	903.042.808,00				
		[Meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis]	Tingkat Ketersediaan Arsip	60	20	35	40	903.042.808,00	-	-	-	-

	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	421.063.910,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis										
			<i>Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan</i>				1000 Berkas	60.484.638,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	149.981.264,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis										
			<i>Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis</i>				100 Unit	210.598.008,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.

	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	131.983.535,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis										
			<i>Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis</i>				1000 Arsip	131.983.535,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	349.995.363,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN										
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i>				100 Pengguna	199.996.708,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimaslisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota										

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>				15 Laporan	149.998.655,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
2,	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-			-	550.466.800,00				
		[Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	50	20	25	30	550.466.800,00	-	-	-	-
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	104.976.798,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun										
			<i>Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan</i>				2000 Berkas	104.976.798,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasiasi Reformasi Birokrasi.
		-	-	-	-	-	-	550.466.800,00	-	-	-	-
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										

			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i>				500 Arsip	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
		[Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK]	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	50	20	25	30	550.466.800,00	-	-	-	-
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-			-	99.999.002,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana										
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				1000 Arsip	99.999.002,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-	-			-	221.498.000,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota										

			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				1000 Arsip	221.498.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-			-	123.993.000,00			-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										
			<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip</i>				100 Arsip	123.993.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X	NON URUSAN						1.253.220.518,00				
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.253.220.518,00				
1,	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	1.253.220.518,00				
		-	-	-	-	-	-	1.253.220.518,00	-	-	-	-

	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	116.995.062,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	911.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	846.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.100.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	8.800.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										

			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	99.838.062,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli si Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				4 Dokumen	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli si Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkandan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				4 Data	4.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik

	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.

	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	-	-			-	86.470.366,00			-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli sa Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegaw ai										
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	2.470.366,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli sa Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegaw ai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				12 Orang	84.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	94.201.890,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	94.201.890,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	734.953.000,00			-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	734.953.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli si Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.600.200,00			-	05. Peningk atan Tata Kelola Pem erintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik6. Meningk atkan Kualitas Pelayanan publik dan optimasli si Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				47 Unit	35.666.200,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	164.934.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	05. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan optimisasi Reformasi Birokrasi.
	J U M L A H							15.025.635.627,00				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026-2026, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong Tahun 2026.
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

Tabalong, 14 Nopember 2026
Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Tabalong,



Hj. NORHAYATI, SE, M.Si

NIP. 19690203 199803 2 005